

Pengaruh Tata Kelola Kelembagaan dan Usaha terhadap Efektivitas Pengelolaan Hutan melalui Kinerja KTH di Perhutanan Sosial Glagalinggah, Kintamani, Bali

Lusi Maulina Pasaribu¹, Ni Luh Prima Kemala Dewi²

^{1,2}Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana
Jl. PB Sudirman, Denpasar, Bali, Telp. 0361 – 255344

Corespondensi: lusimaulin20@gmail.com

Abstrak

Perhutanan sosial merupakan pendekatan pengelolaan hutan yang memberikan hak legal kepada masyarakat lokal untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil tetap menjaga fungsi ekologis hutan. Di Desa Glagalinggah, pelaksanaan program ini masih menghadapi hambatan, terutama pada aspek kelembagaan dan usaha kelompok. Kelemahan dalam dua aspek tersebut berdampak pada kinerja Kelompok Tani Hutan (KTH) yang menjadi faktor penghambat dalam menjaga keberlanjutan usaha serta pemulihan kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pengaruh tata kelola kelembagaan dan usaha terhadap kinerja KTH dan efektivitas pengelolaan perhutanan sosial. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode SEM-PLS untuk menganalisis data dari 70 responden anggota KTH. Hasil menunjukkan bahwa kedua jenis tata kelola berpengaruh signifikan terhadap kinerja KTH, namun tidak berpengaruh langsung terhadap efektivitas pengelolaan hutan. Dengan demikian, kinerja KTH berperan sebagai variabel mediasi penuh. Permasalahan utama dalam pengelolaan hutan lebih banyak berasal dari tata kelola usaha, terutama pada rendahnya partisipasi anggota, keterbatasan akses permodalan, dan kurangnya penerapan teknologi. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan aspek kelembagaan dan usaha sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja kelompok dan efektivitas pengelolaan hutan. Hasil studi ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan perhutanan sosial di tingkat lokal.

Kata Kunci: perhutanan sosial; tata kelola kelembagaan; tata kelola usaha; kinerja KTH

Abstract

Social forestry refers to a forest management approach that grants lawful access to local communities for the sustainable use and stewardship of forest resources. This initiative aims to enhance local livelihoods while ensuring long-term environmental integrity. In Glagalinggah Village, the implementation of this program encounters several challenges, particularly in institutional and business governance aspects. These limitations hinder the performance of Forest Farmer Groups (KTH), which in turn obstruct the continuity of business operations and forest rehabilitation efforts. This research investigates the influence of institutional and business governance on KTH performance and the effectiveness of social forestry management. Employing a quantitative approach with SEM-PLS analysis, data were gathered from 70 KTH members. The findings reveal that while both types of governance significantly influence KTH performance, their direct impact on forest management effectiveness is not significant, establishing KTH performance as a full mediating variable. Business governance issues such as low member participation, limited access to capital, and insufficient technological application emerge as the primary barriers. The study highlights the need to strengthen governance capacity to improve group performance and ensure sustainable forest management outcomes.

These insights can support local-level policy planning for more effective social forestry programs.

Keywords: social forestry; institutional governance; business governance; KTH performance

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan deforestasi dan degradasi hutan masih menjadi tantangan utama dalam sektor kehutanan di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2021), deforestasi diartikan sebagai perubahan kawasan hutan menjadi lahan non-hutan, sementara degradasi mengacu pada penurunan kualitas dan stok karbon hutan yang berdampak pada fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial. Data KLHK (2024) menunjukkan bahwa deforestasi neto Indonesia pada 2021–2022 mencapai 104 ribu hektar, menurun dari 113,5 ribu hektar di periode sebelumnya, namun kembali meningkat pada 2023 menjadi 257.384 hektar, dan naik lagi pada 2024 menjadi 261.575 hektar. Lonjakan angka ini disebabkan oleh berbagai faktor yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Beberapa penyebab utama deforestasi dan degradasi meliputi konflik lahan, rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan, pembatasan akses dalam pemanfaatan hutan, serta konversi lahan untuk keperluan infrastruktur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Selain itu, kelemahan dalam regulasi kelembagaan dan usaha, serta belum optimalnya peran kelompok pengelola hutan, turut memperburuk kondisi tersebut.

Sebagai bagian dari upaya mengatasi masalah tersebut, pemerintah melalui Program Perhutanan Sosial tahun 2020 memberikan izin pengelolaan hutan kepada masyarakat, termasuk di Provinsi Bali. Salah satu lokasi yang mendapat izin tersebut adalah kawasan Perhutanan Sosial Glagalinggah Lestari di Desa Adat Glagalinggah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli (KLHK, 2022). Program ini menerapkan pola yaitu Pengelolaan Hutan yang Berbasis Masyarakat (PHBM) yang bertujuan menjaga kelestarian hutan serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hutan Sosial Glagalinggah diharapkan menjadi contoh pengelolaan hutan yang produktif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan program nasional.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola kelembagaan dan tata kelola usaha terhadap efektivitas pengelolaan hutan melalui kinerja Kelompok Tani Hutan (KTH) di perhutanan sosial Glagalinggah. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana tata kelola kelembagaan dan usaha berperan dalam meningkatkan kinerja KTH yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas pengelolaan hutan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penghambat yang muncul dalam proses pengelolaan hutan, khususnya yang berkaitan dengan kelembagaan dan usaha yang dijalankan oleh KTH, guna memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan ke depan.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada kawasan Hutan Pinus di Desa Adat Glagalinggah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dipilih dengan metode purposive sampling (sampling bertujuan) karena memiliki karakteristik tertentu yang relevan dengan topik penelitian, seperti keterlibatan masyarakat dalam perhutanan sosial, keberadaan kelompok tani hutan (KTH), dan dukungan kebijakan Perhutanan Sosial, serta adanya usaha yang dikembangkan di Perhutanan Sosial tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2025 hingga April 2025.

2.2 Jenis, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data berdasarkan sifatnya yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data kuantitatif dan data kualitatif, data kuantitatif adalah jenis data numerik yang dapat menggambarkan, memprediksi, atau mengontrol variabel. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa tabulasi hasil kuesioner dari skor skala likert. Data kualitatif terdiri dari kata, kalimat, dan gambar, serta dapat diubah menjadi data kuantitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa gambaran umum tempat penelitian, sejarah singkat pengelolaan dan usaha hutan pinus serta profil anggota KTH yang menjadi responden. Berdasarkan sumber data dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, data primer dalam penelitian ini akan diperoleh peneliti berdasarkan fakta di lapangan juga akan diadakan wawancara mendalam terhadap beberapa inti (pengurus) KTH, untuk data sekunder diperoleh dari gambaran umum dan sejarah singkat Desa Adat Glagalinggah diperoleh dari *e-book* profil Desa Adat Glagalinggah tahun 2021. Adapun pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi studi literatur dan wawancara menggunakan alat bantu pengumpulan data yaitu kuesioner.

2.3 Variabel Penelitian dan Metode Analisis Data

Terdapat empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel eksogen terdiri dari tata kelola kelembagaan (X1) yang memiliki indikator yakni struktur dan aturan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota. Tata kelola usaha (X2) dengan indikator pengelolaan keuangan, mitra usaha, jenis usaha dan penggunaan teknologi. Variabel endogen terdiri dari kinerja KTH (Y1) sebagai variabel mediasi dengan indikator kemampuan manajerial dan organisasi, keberlanjutan kegiatan usaha, pengawasan dan pencegahan aktivitas ilegal. Variabel efektivitas pengelolaan hutan (Y2) dengan indikator pemulihan hutan, kesejahteraan sosial dan ekonomi anggota, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Terdapat juga satu variabel independen bebas yakni faktor penghambat pengelolaan hutan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan SEM-PLS software Smart-PLS 4.1.1.1, juga menggunakan analisis deksriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kelayakan Instrumen Penelitian

Kelayakan instrumen penelitian atau dikenal dengan *evaluation measurement model* dikenal sebagai model pengukuran, dimana model ini mendefinisikan setiap indikator yang berhubungan dengan variabel latennya. Analisis outer model dilakukan untuk memastikan layak atau tidaknya suatu model pengukuran, artinya data yang digunakan harus valid dan reliabel. Hasil uji pada kelayakan instrumen penelitian dapat dilihat dari (*Convergen Validity*), uji validitas diskriminan (*Discriminant Validity*), dan uji reliabilitas (*Composite Reliability*).

3.1.1 Kecocokan Indikator terhadap Variabel (Validitas Konvergen)

Uji validitas konvergen dilakukan untuk mengukur besarnya korelasi antar indikator dengan variabel latennya. Uji convergent validity membuktikan bahwa pernyataan-pernyataan pada setiap variabel laten pada penelitian ini dapat dipahami oleh responden. Uji validitas konvergen (*convergent validity*) dapat dievaluasi dari nilai loading factor dan nilai AVE.

Kriteria nilai AVE yang digunakan sebagai syarat data yang valid adalah nilai $AVE \geq 0,5$ apabila nilai $AVE < 0,5$ dapat dikatakan bahwa indikator dalam penelitian ini terbukti tidak dapat mengukur variabel laten yang ditargetkan dan tidak mengukur variabel laten lain. Berikut hasil uji validitas konvergen terhadap nilai AVE dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Nilai AVE (*Average Variance Extracted*)

Variabel	Nilai AVE	Keterangan
X1. Tata Kelola Kelembagaan	0,703	Valid
X2. Tata Kelola Usaha	0,713	Valid
Y1. Kinerja KTH	0,794	Valid
Y2. Ef. Pengelolaan Hutan	0,747	Valid

Tabel 1. dapat dilihat bahwa seluruh variabel laten yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi kriteria nilai $AVE \geq 0,5$. Dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan dalam model penelitian ini terbukti mengukur variabel laten yang ditargetkan dan tidak mengukur variabel laten lain.

3.1.2 Pembeda Antar Konstruk Variabel (Validitas Diskriminan)

Validitas diskriminan digunakan untuk membuktikan bahwa pernyataan pernyataan pada setiap variabel laten tidak dikacaukan oleh responden yang menjawab kuesioner berdasarkan pernyataan-pernyataan pada variabel laten lainnya. Uji validitas diskriminan memastikan bahwa konstruk-konstruk yang berbeda benar-benar mengukur hal yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih. Uji validitas diskriminan (*discriminant validity*) dapat dilihat nilai HTMT.

Tabel 2
Nilai HTMT

Variabel	X1. Tata Kelola Kelembagaan	X2. Tata Kelola Usaha	Y1. Kinerja KTH	Y2. Efektivitas Pengelolaan Hutan
X1				
X2	0.202			
Y1	0.692	0.721		
Y2	0.594	0.648	0.875	

Konstruk dinyatakan valid apabila nilai HTMT antar variabel laten berada di bawah ambang batas yang disarankan, yaitu $< 0,90$. Diketahui bahwa seluruh nilai HTMT antar konstruk berada di bawah ambang batas 0,90. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini memenuhi syarat validitas diskriminan berdasarkan nilai Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT).

3.1.3 Konsistensi dan Ketepatan Pengukuran (Reliabilitas)

Uji reliabilitas merupakan bagian yang digunakan untuk menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel serta untuk menunjukkan konsistensi, ketepatan, serta akurasi instrumen dalam mengukur konstruk, yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *dengan cronbach's alpha dan composite reliability*. Kriteria nilai *cronbach's alpha* harus $\geq 0,7$. Sedangkan, kriteria nilai *composite reliability* $\geq 0,7$ (Rahman & Zahra, 2022). Apabila seluruh nilai variabel laten $\geq 0,7$ berarti konstruk pada penelitian ini mempunyai reliabilitas yang baik. Berikut merupakan nilai *Cronbach's Alpha* dan Nilai *Composite Reliability*.

Tabel 3
Nilai *Cronbach's Alpha* dan Nilai *Composite Reliability*.

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
X1.Tata Kelola Kelembagaan	0.860	0.904	Reliable
X2.Tata Kelola Usaha	0.799	0.882	Reliable
Y1. Kinerja KTH	0.870	0.920	Reliable
Y2.Efektivitas Pengelolaan Hutan	0.831	0.899	Reliable

Berdasarkan Tabel 3. didapatkan hasil bahwa variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini telah memiliki nilai *cronbach's alpha* $\geq 0,7$ dan nilai *composite reliability* $\geq 0,7$, sehingga memiliki arti data telah memenuhi kriteria uji reliabilitas. Kesimpulan yang dapat ditarik yakni seluruh variabel memiliki tingkat konsistensi yang baik atau andal pada masing-masing indikatornya dalam mengukur konstruksinya, sehingga data dalam penelitian ini sudah dikatakan reliabel dan dapat dilakukan pengujian model struktural.

3.2 Hubungan Antar Variabel Penelitian

Untuk melihat hubungan antar variabel digunakan analisis inner model untuk melihat taraf signifikansi hubungan antar variabel laten dalam model penelitian dengan melihat koefisien path dan untuk menyimpulkan hipotesis yang ditolak atau diterima. Dalam mengevaluasi inner model dapat dilakukan dengan melihat koefisien jalur dan uji t-statistik.

3.2.1 Pengaruh Langsung antar Variabel

Pada tahap ini dilakukan uji bootstrapping untuk menilai signifikansi pengaruh antar variabel dan pada akhirnya akan digunakan untuk pengambilan keputusan melalui hipotesis. Program smartPLS hasil uji hipotesis dapat dilihat melalui *bootstrapping*. Dalam metode ini parameter pengukursannya ialah taraf signifikansi 5% ($\alpha=0,05$), dalam hal ini hipotesis dapat diterima jika nilai t-statistik $> 1,96$ dan nilai *p-values* tepat atau kurang dari 0,05 (Ghozali,2016).

Tabel 4
Output path Coefficients (Pengaruh langsung)

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ((O/STDEV))	p values
X1-> Y1	0.526	0.531	0.070	7.514	0.000
X1-> Y2	0.139	0.137	0.105	1.315	0.188
X2-> Y1	0.507	0.509	0.078	6.541	0.000
X2-> Y2	0.175	0.177	0.099	1.767	0.077
Y1->Y2	0.560	0.560	0.119	4.689	0.000

3.2.2 Pengaruh Tidak Langsung (Efek Mediasi)

Pengaruh tidak langsung merupakan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel mediasi. Hubungan antara variabel eksogen dan variabel endogen dengan adanya variabel penghubung disebut variabel mediasi. Dalam penelitian ini pengaruh tidak langsung yang diuji adalah pengaruh tata kelola kelembagaan dan tata kelola usaha terhadap efektivitas pengelolaan hutan di perhutanan sosial Glagalinggah, Kintamani, Bali melalui kinerja KTH sebagai variabel mediasi.

Tabel 5
Output path Coefficients (efek mediasi)

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>T statistics</i>	<i>p values</i>
X1-Y1-Y2	0.295	0.299	0.081	3.650	0.000
X2-Y1-Y2	0.284	0.284	0.073	3.867	0.000

Pengujian hipotesis H1 dilakukan untuk mengetahui apakah tata kelola kelembagaan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan hutan melalui kinerja Kelompok Tani Hutan (KTH) di kawasan perhutanan sosial Glagalinggah. Hipotesis nol (H_01) dapat diartikan bahwa tata Kelola kelembagaan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan hutan melalui kinerja KTH. Sebaliknya, hipotesis alternatif (H_{a1}) menyatakan bahwa tata kelola kelembagaan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan hutan dengan kinerja KTH sebagai variabel mediasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tata kelola kelembagaan memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan hutan melalui variabel kinerja KTH sebagai variabel mediasi dengan nilai t-statistik yang tertera lebih besar dari 1,96 yakni 3,650 dan *p-values* yang tertera kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 dengan besar pengaruh 0,295. *Direct path* atau pengaruh langsung tata kelola kelembagaan terhadap efektivitas pengelolaan hutan diketahui tidak signifikan sedangkan *indirect path* atau pengaruh tidak langsung tata kelola kelembagaan terhadap efektivitas pengelolaan melalui kinerja KTH adalah signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja KTH memediasi pengaruh tata kelola kelembagaan terhadap efektivitas pengelolaan hutan secara *full mediation* (variabel mediasi berperan penuh). Maka hipotesis H_{a1} diterima yaitu tata kelola kelembagaan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan hutan melalui kinerja KTH di perhutanan sosial Glagalinggah, Kintamani, Bali.

Pengujian hipotesis H2 dilakukan untuk mengetahui apakah tata kelola usaha berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan hutan melalui kinerja Kelompok Tani Hutan (KTH) di kawasan perhutanan sosial Glagalinggah. Hipotesis nol (H_02) dapat diartikan bahwa tata kelola usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan hutan melalui kinerja KTH. Sebaliknya, hipotesis alternatif (H_{a2}) menyatakan bahwa tata kelola usaha berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan hutan dengan kinerja KTH sebagai variabel mediasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tata kelola usaha memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan hutan melalui variabel kinerja KTH sebagai variabel mediasi dengan nilai t-statistik yang tertera lebih besar dari 1,96 yaitu 3,867 dan *p-values* yang tertera kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 dengan besar pengaruh 0,284. *Direct path* atau pengaruh langsung tata kelola usaha terhadap efektivitas pengelolaan hutan diketahui tidak signifikan sedangkan *indirect path* atau pengaruh tidak langsung tata kelola usaha terhadap efektivitas pengelolaan melalui kinerja KTH adalah signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja KTH memediasi pengaruh tata kelola usaha terhadap efektivitas pengelolaan hutan secara *full mediation* (variabel mediasi berperan penuh). Maka hipotesis H_{a2} diterima yaitu tata kelola usaha berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan hutan melalui kinerja KTH di perhutanan sosial Glagalinggah, Kintamani, Bali.

Pengaruh Tata Kelola Kelembagaan terhadap Efektivitas Pengelolaan Hutan melalui Kinerja KTH di Perhutanan Sosial Glagalinggah, Kintamani, Bali

Tata kelola kelembagaan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan hutan melalui kinerja Kelompok Tani Hutan (KTH) di perhutanan sosial Glagalinggah pada tabel 5. Hasil olah data pada tabel 5 didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Hefry Oktoyoki, 2023), peneliti menjabarkan bahwa performa tata kelola kelembagaan besar dalam pengelolaan hutan melalui kinerja KTH, lebih dari 56% pengelolaan hutan yang baik didukung oleh tata kelola kelembagaan yang baik dan dinilai melalui kinerja KTH. Penelitian Hefry (2023) juga linear dengan penelitian ini karena indikator yang diteliti hampir sama, yang mana menjelaskan bahwa dari hasil penelitiannya indikator aturan dan dasar hukum, peran serta fungsi transparansi informasi, partisipasi anggota setiap kegiatan, dan akuntabilitas kelembagaan berupa frekuensi rapat, mengikuti pelatihan, dan sistem pembagian kerja yang adil merupakan indikator-indikator yang penting dan sangat diperlukan karena merupakan pencerminan dari baik atau tidaknya tata kelola kelembagaan. Dalam konteks perhutanan sosial, keberhasilan pengelolaan hutan sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan kelompok, yang ditopang oleh penerapan tata kelola kelembagaan yang efektif (Astuti et al., 2023).

Secara empiris, kinerja KTH berperan sebagai *full mediation* atas hubungan tata kelola kelembagaan dengan efektivitas pengelolaan hutan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola kelembagaan belum cukup untuk secara langsung menciptakan efektivitas dalam pengelolaan hutan tanpa terlebih dahulu meningkatkan kinerja KTH sebagai aktor pelaksana di lapangan. Dengan kata lain, kinerja KTH (Y1) menjadi jembatan penting dalam menghubungkan sistem kelembagaan yang tertata dengan hasil akhir berupa efektivitas pengelolaan hutan (Y2). Efektivitas pengelolaan hutan tidak akan tercapai apabila kinerja KTH tidak maksimal, walaupun tata kelola kelembagaan sudah baik.

Peningkatan tata kelola kelembagaan menjadi penting karena indikator yang diteliti berfungsi sebagai pedoman perbaikan, baik dalam struktur aturan kelembagaan, tingkat transparansi, akuntabilitas, maupun partisipasi anggota KTH di perhutanan sosial Glagalinggah. Menurut Oktoyoki (2023), kinerja kelembagaan dievaluasi melalui aspek legalitas, struktur kepengurusan, keterbukaan aturan kelompok, Rencana Kegiatan Kelompok (RKK), serta kelengkapan administrasi yang dimiliki.

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada Tabel 5 bahwa tata kelola kelembagaan merupakan salah satu kunci untuk menciptakan efektivitas pengelolaan hutan melalui kinerja KTH. Variabel tata kelola kelembagaan memberikan hasil yang baik dengan informasi yang didapatkan bahwa tata kelola kelembagaan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan hutan melalui kinerja KTH. Dalam hal ini, tata kelola kelembagaan beserta indikator-indikatornya terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja KTH. Kinerja KTH dinilai berdasarkan kemampuan manajerial, keberlanjutan kegiatan usaha yang dijalankan, serta ketanggapan dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap aktivitas ilegal di dalam hutan. Penilaian tersebut didasarkan pada jawaban responden di lapangan yang menunjukkan hasil yang cukup baik.

Kinerja KTH yang baik ditandai dengan kemampuan manajerial pengurus dalam mengatur jalannya organisasi, mampu menjamin keberlanjutan kegiatan usaha yang dijalankan oleh kelompok serta tanggap terhadap pengawasan dan aktivitas- aktivitas yang dapat merusak ekosistem hutan. Ketika aspek-aspek ini berjalan optimal, maka kelompok akan lebih mampu memulihkan kondisi hutan melalui kegiatan reboisasi atau agroforestri, menjaga kepatuhan terhadap aturan yang telah disepakati bersama (seperti larangan pembalakan liar dan sistem bagi hasil), serta memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan dana, konflik lahan, atau akses pasar. Sebagai contoh, di lapangan hal ini tercermin pada KTH Glagalinggah yang telah berhasil meningkatkan tutupan lahan dengan tanaman rumput gajah di lahan kritis dan terus dibudidayakan, menanam bibit pepohonan baru untuk dikembangkan, menjalankan patroli rutin untuk mencegah perambahan, serta menjalin kerja sama dengan koperasi lokal guna mengatasi permasalahan permodalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja internal kelompok berkontribusi langsung terhadap keberhasilan jangka panjang program perhutanan sosial.

Pengaruh Tata Kelola Usaha terhadap Efektivitas Pengelolaan Hutan melalui Kinerja KTH di Perhutanan Sosial Glagalinggah, Kintamani, Bali

Tata kelola usaha berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan hutan melalui kinerja Kelompok Tani Hutan (KTH) di perhutanan sosial Glagalinggah. Temuan ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Hefry Oktoyoki (2023), yang menjabarkan bahwa performa tata kelola usaha besar dalam pengelolaan hutan melalui kinerja KTH. Lebih dari 48% pengelolaan hutan yang baik didukung oleh tata kelola usaha yang baik pula dan dinilai melalui kinerja KTH. Penelitian Hefry juga linear dengan penelitian ini karena indikator yang diteliti hampir sama, yang mana Hefry menjelaskan bahwa dari hasil penelitiannya indikator yang diteliti ialah pengelolaan keuangan, mitra pengelolaan, jenis usaha yang dijalankan, dan teknologi yang digunakan dalam kelola usaha merupakan indikator-indikator yang penting dan sangat diperlukan karena merupakan pencerminan dari baik atau tidaknya tata kelola usaha dalam perhutanan sosial, untuk hal yang lebih maksimal masih tetap diperlukan pendampingan karena keberhasilan pengelolaan hutan salah satunya ditentukan oleh kinerja kelompok yang di dukung juga dengan tata kelola usaha yang baik. Hefry juga menjelaskan bahwa peningkatan kinerja dalam pengelolaan usaha dapat dicapai melalui perluasan jaringan kemitraan serta peningkatan akses terhadap sumber permodalan guna mendorong pengembangan skala usaha perhutanan sosial. Pengelolaan usaha mengalami perkembangan yang positif sejak awal pembentukannya, ditandai dengan masuknya dukungan modal dan terbentuknya unit usaha dalam bentuk KUPS yang telah beroperasi dengan cukup baik.

Secara empiris, kinerja KTH berperan sebagai *full mediation* atas hubungan tata kelola usaha dengan efektivitas pengelolaan hutan. Tata kelola usaha yang terbentuk di perhutanan sosial Glagalinggah, Kintamani, Bali tidak serta merta langsung mempengaruhi efektivitas pengelolaan hutan, namun akan berpengaruh terlebih dahulu ke kinerja KTH, dan setelah itu akan mempengaruhi efektivitas pengelolaan hutan.

Peningkatan tata kelola usaha memiliki peran penting dalam mendorong kinerja KTH serta efektivitas pengelolaan hutan, karena indikator yang dianalisis menjadi dasar dalam upaya perbaikan, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan, bentuk kemitraan, dan jenis usaha yang dijalankan di kawasan perhutanan sosial Glagalinggah. Oktoyoki (2023) mengungkapkan bahwa penilaian terhadap kinerja KTH dalam mengelola usaha dapat dilakukan melalui beberapa aspek, antara lain sumber permodalan, variasi unit usaha, pola kerja sama, strategi pemasaran, dan pendapatan kelompok yang dihasilkan.

Kinerja Kelompok Tani Hutan (KTH) sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat diukur melalui indikator kemampuan manajerial, keberlanjutan kegiatan usaha, dan ketanggapan terhadap pengawasan serta pencegahan aktivitas ilegal. Di lapangan, banyak KTH yang masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan usaha secara profesional, terutama dalam hal mitra usaha dan pengelolaan keuangan. Sebagian besar KTH masih mengelola usaha secara tradisional atau informal, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk mencapai keberlanjutan kegiatan usaha (Y1.2) dan pengelolaan yang efisien. Selain itu, penggunaan teknologi yang minim juga menjadi kendala yang signifikan. Hal ini terlihat dari indikator X2.4 (teknologi) yang rontok pada uji outer model, menunjukkan bahwa KTH belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan usaha mereka. Keterbatasan ini berpengaruh pada efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya hutan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, KTH juga kesulitan dalam mengawasi dan mencegah aktivitas ilegal seperti penebangan liar atau pembukaan lahan secara ilegal, yang bisa merusak ekosistem hutan.

Faktor Penghambat Pengelolaan Perhutanan Sosial dari Aspek Tata Kelola Kelembagaan dan Tata Kelola Usaha yang Dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH)

Tata Kelola kelembagaan dalam pengelolaan perhutanan sosial di Glagalinggah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya partisipasi pemuda, yang dapat menghambat proses regenerasi pengelola hutan ke depan. Selain itu, kecemburuan sosial juga muncul akibat distribusi manfaat yang dirasakan

belum merata di antara anggota. Regulasi yang ada pun sering kali membingungkan, disebabkan oleh minimnya sosialisasi serta kompleksitas aturan yang berlaku. Untuk mengatasi hal tersebut, disarankan adanya pelatihan kewirausahaan berbasis pemuda, penerapan sistem digitalisasi dalam manajemen kelembagaan, penyelenggaraan musyawarah terbuka, serta penyederhanaan regulasi yang disertai dengan pendampingan intensif dari lembaga terkait maupun pemerintah.

Sementara itu, tata kelola usaha menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan modal, yang menghambat pengembangan berbagai unit usaha seperti Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan sektor ekowisata. Rendahnya kualitas sumber daya manusia serta adanya kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi juga turut memengaruhi produktivitas dan efektivitas pemasaran. Selain itu, berbagai gangguan eksternal seperti cuaca ekstrem, serangan satwa liar, dan keterbatasan sinyal komunikasi semakin menyulitkan pelaksanaan operasional harian. Oleh karena itu, diperlukan upaya perluasan akses permodalan, pelatihan peningkatan keterampilan usaha, penguatan teknologi digital, penerapan langkah mitigasi risiko seperti penggunaan tanaman penghalang atau sistem sensor dini, serta pembentukan kemitraan strategis dengan pihak swasta dan lembaga keuangan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Tata kelola kelembagaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja KTH, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas pengelolaan perhutanan sosial. Artinya, pengaruh kelembagaan bersifat tidak langsung melalui kinerja KTH, sehingga penguatan kelembagaan menjadi kunci efektivitas pengelolaan. Tata kelola usaha juga berpengaruh positif terhadap kinerja KTH. Keberagaman usaha, pengelolaan keuangan, kemitraan, dan pemanfaatan teknologi mendorong kinerja yang berdampak pada efektivitas pengelolaan secara tidak langsung. Namun, efektivitas masih terhambat oleh keterbatasan SDM, akses pasar dan teknologi, modal, serta partisipasi anggota. Dibutuhkan pemberdayaan, pelatihan, kerja sama, dan gotong royong untuk mendukung pengelolaan yang berkelanjutan.

4.2 Saran

Penguatan kelembagaan KTH perlu dilakukan lewat pelatihan, aturan internal yang jelas, serta peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dengan dukungan pendampingan. Tata kelola usaha diperkuat melalui diversifikasi, pencatatan keuangan, kemitraan, dan teknologi. Kinerja KTH ditingkatkan lewat pelatihan manajerial, perencanaan berbasis potensi lokal, dan evaluasi rutin. Hambatan seperti SDM terbatas, akses pasar, modal, partisipasi, dan konflik tenurial perlu diatasi dengan intervensi dan studi lanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, A. D., & Wahyudi, J. (2023). Analisis tata kelola perhutanan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Yogyakarta, Indonesia: UGM Press.
- CIFOR. (2019). Forest tenure reform in Indonesia: The importance of accountability and equity. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). Perhutanan sosial di Provinsi Bali: Laporan pelaksanaan program. Jakarta, Indonesia: KLHK.
- Mahardika, A., Muyani, H. S., & Ilmu, J. (2021). Analisis legalitas perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Asahan. Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK), 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.30596/japk.v1i1.6484>

- Mangasi, E. Y., & Hia, S. W. (2024). Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja karyawan di Indonesia: Sebuah kajian literatur. [Nama jurnal belum lengkap], 18(3), 383–394.
- Martapani, A. N., Fauzi, H., & Naparin, M. (2021). Dampak hutan kemasyarakatan terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat (Studi pada masyarakat peduli gambut Sukamaju, KPH Kayu Tangi). *Jurnal Rimba Lestari*, 1(1), 36–46. <https://doi.org/10.29303/rimbalestari.v1i1.387>
- Nazmi Haddyat Tamara, Nurhayati, F., Vania, H. F., & R. D. (2020). Survei dan indeks perhutanan sosial: Jalan menuju kesejahteraan rakyat dan kelestarian hutan. *Katadata Insight Center*.
- Oktoyoki, H. (2023). Pengaruh tata kelola kelembagaan dan tata kelola usaha terhadap kinerja kelompok tani hutan serta implikasinya terhadap efektivitas pengelolaan hutan di Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Ilmu Kehutanan Tropika*, 15(2), 112–127.
- Rahadi, D.R. 2023. *Pengantar PLS-SEM*. Lentera Ilmu Madani.
- Syahputra, O. H. (2021). Masa depan kedaulatan pangan: Dukungan agroforestri dalam produksi pangan melalui perhutanan sosial. *Prosiding Seminar Nasional Pertanian*, 255–266. <https://ejurnalunsam.id/index.php/psn/article/view/4824>
- Toha, M., Wihadanto, A., & Nurhasanah, N. (2023). Dampak perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dalam mendukung kelestarian hutan di Kota Tarakan. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 7(2), 133–144. <https://doi.org/10.32522/ujht.v7i2.10302>
- Utama, S., Sumardjo, S., Susanto, D., & Gani, D. S. (2015). Dinamika kelompok tani hutan pada pengelolaan hutan produksi bersama masyarakat di Perum Perhutani Unit I Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penyuluhan*, 6(1). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v6i1.10665>